

**PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI  
BERBASIS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)  
PADA SEKOLAH UNGGULAN DI KOTA SEMARANG**

**Agus Wahyudin**✉

**Kiswanto**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Diterima: Januari 2014. Disetujui: Februari 2014. Dipublikasikan: Maret 2014

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi akuntansi pada sekolah unggulan di wilayah kota Semarang yang berdasarkan pada kebutuhan *user*, mengakomodir kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengacu pada ISO 9001. Metode penyusunan sistem informasi akuntansi menggunakan model *information sistem development methods*. Analisis identifikasi kebutuhan informasi akuntansi menggunakan *mix method*, dengan mengkolaborasi persepsi *stakeholder* sekolah dan kebutuhan internal sekolah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemetaan kebutuhan sistem informasi keuangan dan manual prosedur sistem informasi akuntansi sekolah unggulan di Kota Semarang yang terdiri dari Sistem Informasi Penganggaran (SiAnggar), Sistem Informasi Keuangan (SiKeu), Sistem Informasi Akuntansi (SiAkun). Dalam hal ini Sistem Informasi Akuntansi dibagi lagi menjadi tiga Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Aset.

**Abstract**

*This study aims to develop a system of accounting information at outstanding schools in Semarang city which is based on the need of the users, and to accommodate the policy defined by the Ministry of Education and Culture based on ISO 9001. In formulating the accounting information systems, a model information system development method is used. Identification of needs analysis employs mixed method of accounting information by collaborating perception of the stakeholders involved at schools and internal needs of the school. The results show that there is mapping on the need of financial information systems and manual procedures of accounting information systems at the top schools in Semarang city consisting of Budgeting Information System (SiAnggar), Financial Information System (SiKeu), Accounting Information Systems (SiAkun). In this case, the Accounting Information Systems is subdivided into three Accounting Management System, Financial Accounting Systems, and Asset Accounting Systems.*

© 2014 Universitas Negeri Semarang

**Keywords:** *Budgeting Information System (SiAnggar); Financial Information System (SiKeu); Accounting Information Systems (SiAkun)*

---

---

<sup>1</sup> Agus Wahyudin (✉)

E-mail: [aguswahyudin2001@yahoo.com](mailto:aguswahyudin2001@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Beberapa komponen dalam standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah/madrasah, dan (5) sistem informasi manajemen.

Lebih lanjut di jelaskan bahwa Sistem Manajemen Mutu Strategis Pendidikan terdiri atas beberapa Sistem Manajemen yaitu: (1) *Education Criteria Performance Excellence Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) Management Sistem*, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan suatu satuan pendidikan menuju “*World Class High School*” yang berkinerja unggul; (2) *Balanced Scorecard (BSC) Management Sistem*, yang berfungsi sebagai konsep agar satuan pendidikan fokus pada strateginya serta sebagai konsep untuk menerjemahkan Visi, Misi dan Nilai Inti (Kode Etik) sekolah menjadi suatu Rencana Kerja beserta Indikator; (3) *Learn Management Sistem*, yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai satuan pendidikan yang efisien; (4) *Six Sigma Management Sistem*, yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai satuan pendidikan yang efektif (akurat dan presisi) serta sebagai sarana dan indikator kinerja dalam mengukur kapabilitas produk (peserta didik) dan kapabilitas proses yang dipersyaratkan oleh ISO 9001:2008 ; (5) *TRIZ Management Sistem*, yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sebagai satuan pendidikan yang kreatif dan inovatif; (6) *ISO 9001:2008 Quality Management System*, yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan pelanggan dengan mengatur pelaksanaan rencana kerja secara koordinatif dan instruktif melalui pedoman operasi standar; (7) *Computer-based Information Sistem*, yang terdiri atas Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Indonesia, khususnya Standar Akuntansi Pendidikan serta Sistem Informasi Manajemen Sekolah, yang berfungsi sebagai sarana penyaji informasi Biaya Investasi dan Biaya Operasional Pendidikan serta Laporan Keuangan Sekolah berupa Laporan Neraca dan Laporan Surplus Defisit

Dampak dari pemberlakuan ISO 9001:2008 adalah meningkatnya tuntutan masyarakat atas akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun pada kenyataannya sekolah tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang memadai terkait ilmu akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah. Informasi ini diperoleh oleh peneliti pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan responden kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK se-Kota Semarang terkait identifikasi masalah yang dihadapi oleh sekolah di Kota Semarang.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut di atas, salah satu strategi untuk menerapkan manajemen pengelolaan sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah adalah melakukan penerapan *Information and Communication Technology* pada manajemen sekolah. Penerapan yang terkait dengan sistem informasi akuntansi meliputi Sistem Penganggaran (Sianggar), Sistem Keuangan (SiKeu), Sistem

Akuntansi (SiAkunt). Pertimbangan utama dengan menggunakan model ICT dikarenakan masing-masing manajemen dari setiap fungsi pengelolaan yang ada di sekolah, harus memiliki satu muara, sebagai pen-*suppl*y informasi bagi manajemen puncak untuk pengambilan keputusan.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penyelesaian untuk merancang sebuah Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Sekolah pada Sekolah Unggulan di Kota Semarang berbasis *Web*, yaitu metode perancangan sistem dengan menggunakan model *prototype*. Dalam hal ini Sistem Informasi Akuntansi dibagi lagi menjadi tiga Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Aset. Hal ini diharapkan dapat membantu sekolah unggulan di Kota Semarang dalam melakukan pengelolaan keuangan sekolah untuk kepentingan internal sekolah maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* sekolah.

### Jenis Dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan penulis untuk memperoleh informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Dalam proses pengumpulan data penulis mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

### Metode Pendekatan Dan Pengembangan Sistem

Untuk memudahkan dalam pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan metode pendekatan dan pengembangan sistem, yaitu:

1. Metode Pendekatan Sistem. Metode pendekatan sistem yang digunakan oleh penulis untuk merancang sistem informasi akademik berbasis *web* adalah metode pendekatan berorientasi objek (*Object Oriented*), yaitu dengan menggunakan notasi UML (*Unified Modelling Language*) untuk alat visualisasi analisis dan perancangan.
2. Metode Pengembangan Sistem. Metode pengembangan sistem informasi (*information systems development methods*) menggunakan pengembangan sistem dengan model *prototype*. *Prototyping* merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode *prototyping* ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem.

Pengujian Software. Pengujian merupakan proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis dengan tujuan untuk menguji apakah perangkat lunak tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Metode pengujian yang digunakan dalam perancangan sistem informasi. Manajemen pengelolaan sekolah unggulan di Kota Semarang adalah metode *black box*. Metode pengujian *black box* merupakan metode yang digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat

bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan mapping kebutuhan sekolah terhadap implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sekolah. Sampel yang digunakan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Se Kota Semarang. Dalam hal ini kita melakukan penelitian populasi dengan mengambil seluruh jumlah SMA Negeri yang ada di Kota Semarang, yakni sebanyak 16 SMA Negeri.

**Tabel 1.** Sampel Penelitian

Jumlah SMA Negeri Di Kota Semarang	16
Yang Tidak Bersedia Mengisi Kuesioner	(1)
Yang Tidak Mengembalikan Kuesioner	(3)
Jumlah SMA Negeri Sebagai Sampel	12

Sumber: Data Olah 2013

Pada tabel 1 di atas terlihat bahwa hanya 12 sekolah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sampel penelitian. Ada 1 sekolah yang tidak bersedia mengisi kuesioner dan ada 3 sekolah yang tidak mengembalikan kuesioner penelitian. Selanjutnya disajikan demografi responden penelitian pada table 2 berikut ini:

**Tabel 2.** Demografi Responden

SMA	Jabatan	Lama Bekerja	Usia	Jenis Kelamin
A	Kepala Sekolah	37	57	Wanita
B	Staf	26	54	Pria
C	Kepala Sekolah	25	50	Pria
D				
E	Guru	26	52	Wanita
F	Kepala Sekolah	8	58	Pria
G	Kepala Sekolah	25	49	Pria
H	Kepala Sekolah	29	52	Wanita
I	Bendahara	25	52	Wanita
J	Waka Kurikulum	15	43	Wanita
K	Guru	23	47	Pria
L	Kepala Sekolah	1	50	Wanita

Sumber: Olah Data 2013

Tabel 2 dapat terlihat bahwa dari 12 sekolah yang mengisi kuesioner terdapat 6 orang yang memiliki jabatan sebagai kepala sekolah, 2 orang sebagai guru, 1 orang bendahara, 1 orang staf dan yang 1 tidak mengisi data diri. Terkait dengan masa kerja sangat bervariasi. Terkait dengan usia responden semua responden memiliki usi di atas 40 tahun. Sedangkan terkait dengan jenis kelamin maka terdiri dari 5 orang wanita, 6 orang pria dan yang 1 tidak mengisi data diri.

### Deskripsi Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada SMA Se-Kota Semarang

1. Sistem Informasi Penganggaran. Terkait dengan sistem penganggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 9 sekolah atau 75% sekolah telah memiliki Sistem Penganggaran dan terdapat 3 sekolah atau 25% sekolah belum memiliki Sistem Penganggaran.
2. Sistem Informasi Keuangan. Terkait dengan Sistem Informasi Keuangan, hasil penelitian menunjukkan terdapat 9 sekolah atau 75% sekolah telah memiliki Sistem Keuangan dan 3 sekolah (25%) yang belum memiliki Sistem Keuangan.
3. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Hasil penelitian yang terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, sekolah yang telah memiliki sistem informasi ini sebanyak 7 sekolah (58%) telah memiliki Sistem Akuntansi Keuangan dan 3 sekolah (42%) belum memiliki Sistem Akuntansi Keuangan.
4. Sistem Informasi Akuntansi Biaya. Sekolah yang telah memiliki sistem Sistem Informasi Akuntansi Biaya sebanyak 5 buah atau 42% sekolah dan 7 buah atau 58% sekolah belum memiliki Sistem Informasi Akuntansi Biaya.
5. Sistem Informasi Akuntansi Aset. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 8 sekolah (67%) telah memiliki Sistem Akuntansi Aset dan sisanya 4 sekolah (33%) belum memiliki Sistem Akuntansi Aset.

Dalam pengimplementasian Sistem Informasi Akuntansi di sekolah, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi faktor pendukung maupun kendala. Faktor tersebut adalah komitmen pimpinan, pendanaan, ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan dukungan dari dinas. Tabel 3. di bawah menggambarkan persentase sekolah yang menganggap faktor-faktor diatas sebagai faktor pendukung atau faktor kendala dalam implementasi Sistem Informasi Akuntansi Di Sekolah.

**Tabel 3.** Prosentase Faktor Pendukung dan Kendala Sistem Informasi Akuntansi Di Sekolah

Keterangan	Pendukung		Kendala		Tidak Memberi Isian		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sistem Komitmen								
Pimpinan	10	83%	0	0%	2	17%	12	100%
Pendanaan	7	58%	3	25%	2	17%	12	100%
Sarpras	9	75%	1	8%	2	17%	12	100%

Kompetensi								
SDM	8	67%	2	17%	2	17%	12	100%
Dukungan Dinas	9	75%	1	8%	2	17%	12	100%

Sumber: Olah Data 2013

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 10 (83%) sekolah yang menganggap komitmen pimpinan sebagai faktor pendukung, terdapat 0 (0%) sekolah yang menganggap komitmen pimpinan sebagai faktor kendala sedangkan 2 (17%) sekolah tidak memberikan isian. Terkait pendanaan didapatkan hasil bahwa terdapat 7 (58%) sekolah yang menganggap pendanaan sebagai faktor pendukung, terdapat 3 (25%) sekolah yang menganggap pendanaan sebagai faktor kendala sedangkan 2 (17%) sekolah tidak memberikan isian. Terkait sarana prasarana didapatkan hasil bahwa terdapat 9 (75%) sekolah yang menganggap sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung, terdapat 1 (8%) sekolah yang menganggap komitmen pimpinan sebagai faktor kendala sedangkan 2 (17%) sekolah tidak memberikan isian. Terkait kompetensi SDM didapatkan hasil bahwa terdapat 8 (67%) sekolah yang menganggap kompetensi SDM sebagai faktor pendukung, terdapat 2 (17%) sekolah yang menganggap kompetensi SDM sebagai faktor kendala sedangkan 2 (17%) sekolah tidak memberikan isian. Terkait dukungan dinas didapatkan hasil bahwa terdapat 9 (75%) sekolah yang menganggap dukungan dinas sebagai faktor pendukung, terdapat 1 (8%) sekolah yang menganggap dukungan dinas sebagai faktor kendala sedangkan 2 (17%) sekolah tidak memberikan isian.

Persepsi responden atas kuesioner menunjukkan hasil bahwa terdapat 4 (33%) responden yang menganggap penting dan 8 (67%) responden yang menganggap sangat penting terkait dengan tersedianya laporan pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* sekolah. Terkait dengan tersedianya laporan pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel dalam rangka pengambilan keputusan manajerial terdapat 5 (42%) responden yang menganggap penting dan 7 (58%) responden yang menganggap sangat penting. Terkait dengan Penyusunan dan revisi anggaran sekolah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat menggunakan sistem informasi penganggaran terdapat 5 (42%) responden yang menganggap penting dan 7 (58%) responden yang menganggap sangat penting. Terdapat 4 (33%) responden yang menganggap penting dan 8 (67%) responden yang menganggap sangat penting terkait dengan **Sistem Informasi Penganggaran** berbasis ICT mampu untuk mengakomodasi seluruh Sumber pendapatan (Misal: APBN-BOS, APBD-Propinsi, APBD-Kota/kab, Partisipasi Masyarakat, dll).

### **Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sekolah untuk pengelolaan Pendapatan Sekolah**

Matriks yang disajikan pada lampiran (Tabel 5) menggambarkan bahwa sekolah di Kota Semarang memiliki berbagai sumber pendapatan yang beraneka ragam, sehingga dalam pengelolaannya harus didukung dengan sistem pelaporan keuangan yang memadai. Sumber pendapatan tersebut antara lain APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, partisipasi masyarakat, pendapatan lain yang sah dan bantuan pihak

ketiga. Pendapatan terdiri dari empat macam yaitu APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan partisipasi masyarakat. APBN terdiri dari 4 jenis pendapatan yaitu, yang memiliki DAU sebanyak 4 sekolah (25%); BOS sebanyak 8 sekolah (50%); Block Grand sebanyak 8 sekolah (50%); APBN Lainnya sebanyak 5 sekolah (31,25%).

APBD Provinsi terdiri dari 3 jenis pendapatan yaitu, yang memiliki BOS Provinsi sebanyak 1 sekolah (6.25%); Bantuan Keuangan sebanyak 4 sekolah (25%); APBD Provinsi lainnya sebanyak 2 sekolah (12.5%). APBD Kota terdiri dari 4 jenis pendapatan yaitu, yang memiliki Dana Operasional Sekolah sebanyak 8 sekolah (50%); BOS Kota sebanyak 9 sekolah (56,25%); Biaya Bahan Praktek sebanyak 1 sekolah (6,25%); APBD Kota Lainnya sebanyak 8 sekolah (50%). Partisipasi Masyarakat terdiri dari 3 jenis pendapatan yaitu, yang memiliki Sumbangan Sukarela tidak Mengikat sebanyak 4 sekolah (25%); Sumbangan Operasional Sekolah sebanyak 6 sekolah (37,5%); Sumbangan Investasi Sekolah sebanyak 4 sekolah (25%).

Selanjutnya lebih rinci dapat dijelaskan bahwa sumber dan jenis pendapatan untuk masing-masing sekolah di kota Semarang guna mengidentifikasi keragaman kebutuhan akan sistem pelaporan keuangan. Pendapatan APBN terdiri dari DAU, BOS, Block Grand dan APBN Lainnya. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 4 sekolah (25%) yang memiliki DAU, sedangkan 12 sekolah (75%) tidak memiliki DAU. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 8 sekolah (50%) yang memiliki dana BOS (Rintisan BOS), sedangkan 8 sekolah (50%) tidak memiliki BOS (Rintisan BOS). Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 8 sekolah (50%) yang memiliki dana Block Grand, sedangkan 8 sekolah (50%) tidak memiliki Block Grand.

Pendapatan APBD Provinsi terdiri dari dana BOS Provinsi, Bantuan Keuangan dan APBD Provinsi Lainnya. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 1 sekolah (6.25%) yang memiliki dana BOS Provinsi, sedangkan 15 sekolah (93.75%) tidak memiliki BOS Provinsi. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 4 sekolah (25%) yang memiliki dana Bantuan Keuangan, sedangkan 12 sekolah (75%) tidak memiliki Bantuan Keuangan. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 2 sekolah (12.5%) yang memiliki dana APBD Provinsi Lainnya, sedangkan 14 sekolah (87.5%) tidak memiliki APBD Provinsi Lainnya.

Pendapatan APBD Kota terdiri dari dana Dana Operasional Sekolah, Bos Kota, Biaya Bahan Praktek, dan APBD Kota Lainnya. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 8 sekolah (50%) yang memiliki dana Dana Operasional Sekolah, sedangkan 8 sekolah (50%) tidak memiliki Dana Operasional Sekolah. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 9 sekolah (56,25%) yang memiliki dana Bos Kota, sedangkan 8 sekolah (43.75%) tidak memiliki Bos Kota. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 1 sekolah (6.25%) yang memiliki dana Biaya Bahan Praktek, sedangkan 15 sekolah (93.75%) tidak memiliki Biaya Bahan Praktek. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 8 sekolah (50%) yang memiliki dana Dana APBD Kota Lainnya, sedangkan 8 sekolah (50%) tidak memiliki Dana Kota Lainnya.

Pendapatan Partisipasi Masyarakat terdiri dari dana Sumbanga Sukarela tidak Mengikat, Sumbangan Operasional Sekolah, dan Sumbangan Investasi Sekolah. Dari 16 Sekolah Menengah Atas

Negeri di Kota Semarang terdapat 4 sekolah (25%) yang memiliki dana Sumbangan Sukarela tidak Mengikat, sedangkan 12 sekolah (75%) tidak memiliki Sumbangan Sukarela tidak Mengikat. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 6 sekolah (37,5%) yang memiliki dana Sumbangan Operasional Sekolah, sedangkan 8 sekolah (43.75%) tidak memiliki Sumbangan Operasional Sekolah. Dari 16 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang terdapat 4 sekolah (25%) yang memiliki dana Sumbangan Investasi Sekolah, sedangkan 8 sekolah (43.75%) tidak memiliki Sumbangan Investasi Sekolah.

### **Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sekolah untuk pengelolaan Jenis Belanja Sekolah**

Berdasarkan rincian di atas nampak bahwa masing-masing sekolah sebagai objek pengamatan memiliki sumber pendapatan dan jenis pendapatan yang kompleks. Kompleksitas tersebut ditambah lagi dengan berbagai macam aturan untuk bagaimana pendapatan tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan menurut pemberi dana. Misalnya pendapatan yang bersumber dari APBN harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang sistem keuangan Negara. Hal ini tentunya berbeda ketika sebuah sekolah mendapatkan sumber pendanaan yang berbeda, sebagai missal dari APBD kota itu harus dipertanggungjawabkan sesuai UU keuangan Negara dan harus juga dikelola dengan peraturan daerah, sehingga kadangkala akan mempersulit pelaporan keuangannya. Disisi lain ada berbagai macam kebutuhan pembelamjaan yang harus dilakukan oleh sekolah. Berikut ini disajikan matriks jenis belanja.

Dalam hal alokasi pembelanjaan baik langsung maupun tidak langsung sekolah harus bisa mengelola dengan baik. Artinya bahwa sekolah harus mampu mengelola dengan baik pembelanjaan sesuai dengan sumber pendapatan yang diperoleh dari pemberi dana. Sehingga berdasarkan pengamatan yang dilakukan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah membutuhkan sebuah sistem pengelolaan sampai proses pelaporan keuangan yang dapat memadukan seluruh pendapatan dan belanja. Dengan sistem ini nantinya sekolah akan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan perkembangan sistem informasi saat ini, maka sekolah dapat mengembangkan sistem pengelolaan keuangan sekolah berbasis teknologi informasi. Hal ini mutlak dilakukan sehingga dapat mendukung jajaran manajemen sekolah dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran disekolah.

Lebih rinci jenis belanja sekolah disajikan tabel 7 dan 8 (lihat lampiran) menunjukkan bahwa belanja terdiri dari dua jenis yaitu belanja tidak langsung pegawai dan belanja langsung pegawai. Belanja tidak langsung pegawai terdiri dari 9 jenis yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan PPh, tunjangan Struktural, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Pendidikan, Kesejahteraan Pegawai, Lain-lain.

Sekolah yang memiliki Belanja Tidak Langsung Pegawai sebanyak 1 sekolah (6%); yang tidak memiliki gaji pokok sebanyak 15 sekolah (94%). Sekolah yang memiliki gaji pokok sebanyak 10 sekolah (63%); yang tidak memiliki tunjangan keluarga sebanyak 5 sekolah (31%). Sekolah yang memiliki



tunjangan beras sebanyak 10 sekolah (63%); yang tidak memiliki tunjangan beras sebanyak 5 sekolah (31%). Sekolah yang memiliki tunjangan PPh sebanyak 10 sekolah (63%); yang tidak memiliki unjangan PPh sebanyak 5 sekolah (31%). Sekolah yang memiliki tunjangan struktural sebanyak 9 sekolah (56%); yang tidak memiliki tunjangan keluarga sebanyak 7 sekolah (31%). Sekolah yang memiliki tunjangan fungsional sebanyak 10 sekolah (56%); yang tidak memiliki tunjangan keluarga sebanyak 7 sekolah (31%).

## PENUTUP

Berdasarkan tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti hingga laporan kemajuan ini dibuat, dapat diperoleh kesimpulan sementara bahwa:

1. Sebagian besar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang belum menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis ICT terkait pelaporan keuangannya.
2. Tanggapan para personil sekolah terhadap sistem yang akan dibangun oleh peneliti sangat luar biasa, sehingga hal ini merupakan modal awal kesuksesan sistem yang akan dibangun.
3. Mayoritas sekolah menganggap bahwa Komitmen Pimpinan, Pendanaan, Sarpras, Kompetensi SDM, Dukungan Dinas merupakan faktor pendukung dan bukan sebagai faktor penghambat dalam implementasi sistem informasi akuntansi berbasis ICT.
4. Mayoritas sekolah menganggap bahwa sistem informasi akuntansi berbasis ICT terkait pelaporan keuangannya merupakan hal yang penting untuk diimplementasikan
5. Sekolah telah memiliki Sistem Penganggaran, Sistem Keuangan dan Sistem Akuntansi Asset yang dilakukan secara manual, namun belum memiliki Sistem Akuntansi Biaya.
6. Pengendalian Internal yang melekat pada Sistem Informasi Akuntansi secara manual yang ada di sekolah belum berjalan dengan baik karena belum ada pemisahan fungsi antara bidang akuntansi dan bendahara.
7. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh tim peneliti dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang dikelola dengan manajemen sederhana/kuno, sehingga berdasarkan data tersebut diperlukan suatu perhatian yang ekstra dari pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat mengupayakan agar menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi yaitu suatu penelitian yang mampu memberikan inovasi di bidang pengembangan sistem informais khusus untuk pendidikan dengan judul Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis *Informastion And Communication Technology* (ICT) Pada Sekolah Unggulan Di Kota Semarang. Meskipun dalam penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan atau kelemahan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan obyek penelitian Sekolah Menengah Atas Negeri se Kota Semarang, sehingga mengurangi kemampuan dalam generalisasi hasil penelitian di luar objek tersebut.

2. Kurang representatifnya sampel dikarenakan terdapat sekolah yang tidak memberikan kesanggupan untuk dijadikan sampel ataupun sanggup dijadikan sampel namun tidak mengembalikan kuesioner.
3. Analisa data hanya menggunakan kuantitatif analisis.

Sehingga saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi sekolah di Kota Semarang hendaknya menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis ICT dalam pengelolaan keuangan sekolah.
2. Bagi pihak-pihak yang terkait hendaknya lebih memperbanyak pelatihan yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi berbasis ICT.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).(2002). *Consideration of fraud in a financial statement audit*. Statement on auditing standards No.99. NewYork,NY: AICPA.
- Apostolon, N. & Crumbley, D.L.(2005). Fraud surveys: lessons for forensic accounting. *Journal of Forensic Accounting*, 4: 103-118.
- BAPEPAM-LK. (2010). Laporan Tahunan 2009
- BAPEPAM-LK. (2009). Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-412/BL/2009 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu
- BAPEPAM-LK. (2001). Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1. tentang transaksi afiliasi
- Bainbridge, Stephen M., 1999. *A Behavioral Economic Analysis of Mandatory Disclosure:A Thought Experiment Turned Cautionary Tale*. Working Paper
- Beasley, M.(1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The AccountingReview*, 71(4), 443–465.
- Beneish, M.(1997).Detecting GAAP violation: Implications for assessing earnings management among firms with extreme financial performance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(3), 271–309.
- Bower, J. & Gilson, S. (2003). *The Social Cost of Fraud and Bankruptcy*. Harvard Business Review, December 03.
- Cendrowski, H., Martin, J.P. & Pedro, L.W. (2007). *The Handbook of Fraud Deterrence*. John Wiley & Son, United States.
- CLSA (2007). CG Watch: Corporate Governance in Asia. Regional Special Report of CLSA in cooperation with Asian Corporate Governance Association (ACGA)
- Cooke, T.E. (1991). Disclosure in the Corporate Annual reports of Swedish Companies, *Accounting and Business Research*, 19, Spring, pp. 113-124.
- Cressey, D.(1953). *Other people's money; a study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, IL:FreePress.
- Dechow, P., Sloan,R., & Sweeney,A.(1996).Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by theSEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 1–36.
- Deegan, C. (2000). *Financial accounting theory*. McGrawHill Publisher, 2<sup>nd</sup> Edition, Australia
- Farber, D.B.(2005). Restoring trust after fraud: Does corporate governance matter? *The Accounting Review*, 80(2), 539–561.

- Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2007). Financial fraud, director reputation, and shareholder wealth. *Journal of Financial Economics*. 86. 306-336
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2004). *Review of Corporate Governance in Indonesia*. Publication, dapat diakses melalui <http://www.fcgi.or.id>
- Gertner, R.H., Scharfstein, D.S, & Stein, J.C. (1994). Internal versus External Capital Markets. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(4), 1211-1230
- Hendriksen, Eldon S., & Van Breda, M. (1998). *Accounting Theory*, fifth edition, Irwin-McGraw-Hill
- Hirschey, M, John, K, & Makhija, A.M. (2009). *Advances in Financial Economics: Corporate Governance and Performance*. 1<sup>st</sup> edition, JAI Publishing, Emerald Group. Vol. 13
- Husnan, S. (2001). Indonesia in Zhuang J., David Edwards and Virginia A. Capulong (Eds.), *Corporate governance and finance in East Asia: a study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand* (Volume 2 pp.1-23). Asian Development Bank.
- Ikatan akuntan Indonesia. (2001). *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia per 1 April 2001*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta, edisi kedua.
- Jensen, M. C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure, *Journal of Financial Economics*, 3: 305–360.
- Kaminski, K.,Wetzel, T., & Guan, L.(2004). Can financial ratios detect fraudulent financial reporting? *Managerial AuditingJournal*, 19(1), 15–28.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., and Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. *Journal of Finance* 54 No.2, 471-5178.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Zamarripa, G. (2003). Related lending, *Quarterly Journal of Economics*, 119, 231-268.
- Lo, Agnes W.Y., Wong, R.M.K., & Firth, M. (2009). Can corporate governance deter management from manipulating earnings? Evidence from related-party sales transactions in China. *Journal of Corporate Finance*, doi:10.1016/j.jcorpfin.2009.11.002
- Lou, Y.I., & Wang, M.L. (2009). Fraud Risk Faktor of the Fraud Triangle Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting. *Journa of Business and Economic Research*. Vol.7 (2), 62-66
- McCahery, J.A., & Vermeulen, E.P.M. (2005). *Corporate governance crises and related party transactions: a post parmalat agenda*. Working Paper University of Groningen, Netherland
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. *Journal of Accounting and Economics*. 42: 335-370.
- Saudagaran, S.M., & Diga, J.G. (1997). Financial Reporting in Emerging Capital Market: Characteristics and Policy Issues, *Accounting Horizon*, Vol 11, No. 2.
- Skousen, C.J., Smith, K.R, & Wright, C.J. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: the Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No.99; in *Advances in Financial Economics: Corporate Governance and Performance* 1<sup>st</sup> edition, JAI Publishing, Emerald Group. Vol. 13
- Skousen,C.J.& Wright,C.(2008).Contemporaneous risk factors and the prediction of financial statement fraud. *Journal of ForensicAccounting*, IX, 37–62.
- Turner, J.L., Mock, T.J., & Sripastava, R.P. (2003). *An Analysis of the Fraud Triangle*. Working Paper.
- World Bank. (2004). *Report on the observance of standards and codes (ROSC)-Corporate governance country assessment Republic of Indonesia*. Available at <http://www.rtu.worldbank.org/PapersLinks/Open.aspx?id=6881>

lampiran-lampiran

**Tabel 4.** Prosentase Persepsi Responden atas Kuesioner

Keterangan	Kurang Penting		Netral		Agak Penting		Penting		Sangat Penting		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tersedianya laporan pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada <i>stakeholder</i> sekolah.	0	0%	0	0%	0	0%	4	33%	8	67%	12	100%
Tersedianya laporan pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel dalam rangka pengambilan keputusan manajerial.	0	0%	0	0%	0	0%	5	42%	7	58%	12	100%
Penyusunan dan revisi anggaran sekolah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat menggunakan sistem informasi penganggaran.	0	0%	0	0%	0	0%	5	42%	7	58%	12	100%
Sistem Informasi Penganggaran berbasis ICT mampu untuk mengakomodasi seluruh Sumber pendapatan (Misal: APBN-BOS, APBD-Propinsi, APBD-Kota/kab, Partisipasi Masyarakat, dll)	0	0%	0	0%	0	0%	4	33%	8	67%	12	100%

Keterangan	Kurang Penting		Netral		Agak Penting		Penting		Sangat Penting		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tersedianya alat pengendalian dalam pengelolaan keuangan sekolah melalui sistem informasi keuangan.	0	0%	0	0%	0	0%	7	58%	5	42%	12	100%
Sistem Informasi Keuangan/BP dan BPP berbasis ICT mampu untuk mengakomodasi seluruh Sumber pendapatan (Misal: APBN-BOS, APBD-Propinsi, APBD-Kota/kab, Partisipasi Masyarakat, dll)	0	0%	0	0%	0	0%	5	42%	7	58%	12	100%
Tersedianya sistem informasi akuntansi untuk melakukan pencatatan transaksi sekolah secara akuntabel.	1	8%	0	0%	0	0%	5	42%	6	50%	12	100%
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan berbasis ICT mampu untuk mengakomodasi seluruh Sumber pendapatan (Misal: APBN-BOS, APBD-Propinsi, APBD-Kota/kab, Partisipasi Masyarakat, dll)	0	0%	0	0%	0	0%	4	33%	8	67%	12	100%
Tersedianya sistem informasi akuntansi Biaya untuk menyajikan informasi keuangan sekolah yang akuntabel khususnya bagi	0	0%	0	0%	0	0%	6	50%	6	50%	12	100%

Keterangan	Kurang Penting		Netral		Agak Penting		Penting		Sangat Penting		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
manajemen (pimpinan sekolah).												
Sistem Informasi Biaya berbasis ICT mampu untuk mengakomodasi seluruh Sumber pendapatan (Misal: APBN-BOS, APBD- Propinsi, APBD- Kota/kab, Partisipasi Masyarakat, dll)	0	0%	0	0%	0	0%	5	42%	7	58%	12	100%
Tersedianya informasi mutasi persediaan dan asset tetap sekolah yang akuntabel.	0	0%	0	0%	1	8%	3	25%	8	67%	12	100%
Sistem Informasi Asset berbasis ICT mampu untuk mengakomodasi seluruh Sumber pendapatan (Misal: APBN-BOS, APBD- Propinsi, APBD- Kota/kab, Partisipasi Masyarakat, dll)	0	0%	0	0%	0	0%	3	25%	9	75%	12	100%
Tersedianya Sistem Informasi Akuntansi sekolah yang terintegrasi antara sistem penganggaran, sistem keuangan, dan sistem akuntansi.	0	0%	1	8%	0	0%	5	42%	6	50%	12	100%

Sumber: Data diolah, 2013

**Tabel 5.** Matriks Sumber dan Jenis Pendapatan Sekolah di Kota Semarang

No	Sumber Pendapatan/Jenis Pendapatan					
	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	Partisipasi Masyarakat	Pendapatan Lain yang sah	Bantuan Pihak Ketiga
1	DAU	BOS Provinsi	Dana Operasional Sekolah	Sumbangan Sukarela tidak Mengikat	Jasa Produksi	Bantuan Luar Negeri
2	DAK	Bantuan Keuangan	Bos Kota	Sumbangan Operasional Sekolah	Hasil Sewa	Bantuan Lainnya
3	Dekonsentrasi	Hibah	Biaya Bahan Praktek	Sumbangan Investasi Sekolah	Kerjasama dgn Pihak Ketiga	
4	Tugas Pembantuan	Bantuan Sosial	APBD Kota Lainnya	Sumbangan Dunia Usaha/Industri	Pendapatan Lainnya	
5	BOS / Rintisan BOS	APBD Provinsi Lainnya		Sumbangan Lainnya		
6	Block Grand					
7	APBN Lainnya					

Sumber : Data diolah, 2013

**Tabel 6.** Mapping Sumber dan Jenis Pendapatan Sekolah di Kota Semarang

Jenis Pendapatan	Jumlah Objek Pengamtan	Jumlah Objek berdasarkan sumber pendapatan	Prosentase
<b>APBN</b>			
DAU	16	4	25.00%
BOS / Rintisan BOS	16	8	50.00%
Block Grand	16	8	50.00%
APBN Lainnya	16	5	31.25%

Jenis Pendapatan	Jumlah Objek Pengamantan	Jumlah Objek berdasarkan sumber pendapatan	Prosentase
<b>APBD Provinsi</b>			
BOS Provinsi	16	1	6.25%
Bantuan Keuangan	16	4	25.00%
APBD Provinsi Lainnya	16	2	12.50%
<b>APBD Kota</b>			
Dana Operasional Sekolah	16	8	50.00%
Bos Kota	16	9	56.25%
Biaya Bahan Praktek	16	1	6.25%
APBD Kota Lainnya	16	8	50.00%
<b>Partisipasi Masyarakat</b>			
Sumbangan Sukarela	tidak		
Mengikat	16	4	25.00%
Sumbangan Operasional Sekolah	16	6	37.50%
Sumbangan Investasi Sekolah	16	4	25.00%

Sumber : Data diolah, 2013

**Tabel 7.** Matriks Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	
	Belanja Tidak Langsung Pegawai	Belanja Langsung (Pegawai, Barang dan jasa, Modal)
1	Gaji Pokok	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Tunjangan Keluarga	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
3	Tunjangan Beras	Program Pendidikan Menengah
4	Tunjangan PPh	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5	Tunjangan Struktural	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6	Tunjangan Fungsional	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7	Tunjangan Pendidikan	Program peningkatan Disiplin Aparatur
8	Kesejahteraan Pegawai	
9	Lain-lain	

Sumber : Data diolah, 2013



**Tabel 8.** Mapping Sumber dan Jenis Belanja Sekolah di Kota Semarang

Jenis Belanja	Rincian Belanja	Ada		Tidak Ada	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
<b>Belanja Tidak Langsung Pegawai</b>		1	6%	15	94%
Gaji Pokok		10	63%	5	31%
Tunjangan Keluarga		10	63%	5	31%
Tunjangan Beras		10	63%	5	31%
Tunjangan PPh		10	63%	5	31%
Tunjangan Struktural		9	56%	7	44%
Tunjangan Fungsional		10	63%	6	38%
Tunjangan Pendidikan		2	13%	14	88%
Kesejahteraan Pegawai		7	44%	9	56%
Lain-lain		2	13%	14	88%
<b>Belanja Langsung</b>		2	13%	14	88%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pegawai	7	44%	9	56%
	Barang dan Jasa	9	56%	7	44%
	Modal	3	19%	13	81%
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pegawai	1	6%	15	94%
	Barang dan Jasa	5	31%	11	69%
	Modal	4	25%	12	75%
Program Pendidikan Menengah	Pegawai	7	44%	9	56%
	Barang dan Jasa	9	56%	7	44%
	Modal	8	50%	8	50%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pegawai	3	19%	13	81%
	Barang dan Jasa	1	6%	15	94%
	Modal	0	0%	16	100%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pegawai	1	6%	15	94%
	Barang dan Jasa	1	6%	15	94%
	Modal	0	0%	16	100%
Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pegawai	1	6%	15	94%
	Barang dan Jasa	2	13%	14	88%
	Modal	0	0%	16	100%
Program peningkatan Disiplin	Pegawai	0	0%	16	100%

Jenis Belanja	Rincian Belanja	Ada		Tidak Ada	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Aparatur	Barang dan Jasa	1	6%	15	94%
	Modal	1	6%	15	94%

Sumber : Data diolah, 2013